

## ASISTENSI PENYUSUNAN SBI *E-POCKETBOOK* SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Ahmad Abbas

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene

### Abstrak

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Indonesia yang dibangun sejak tahun 2016, STAIN Majene didorong untuk melakukan optimalisasi sistem pengendalian anggaran berbasis kinerja melalui standar biaya. Kegiatan pengabdian ini didesain dengan menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*. Model pengembangan produk menggunakan model 4D (Definisi, Desain, Pengembangan, dan Diseminasi) yang diadopsi dari model Thiagarajan et al. (1974). Setelah itu, para pengguna anggaran diajar sehingga mereka mahir dalam menggunakan produk Standar Biaya Internal (SBI). Hasil kegiatan ini mengungkapkan bahwa produk SBI sukses dihasilkan dalam bentuk buku saku digital yang disebut sebagai SBI *e-pocketbook*. Produk tersebut adalah satuan biaya yang menjadi acuan perhitungan anggaran internal STAIN Majene dan instrumen penting dalam penyusunan alokasi anggaran sehingga produk SBI berkontribusi terhadap pengguna anggaran di STAIN Majene.

**Kata Kunci:** Anggaran, Pengendalian, Biaya, Kinerja, SBI

### Abstract

*As one of the educational institutions under the Ministry of Religion Indonesia established in 2016, STAIN Majene is led to conduct the optimization of a performance-based budgetary control system through costing standards. This development activity was designed using Participatory Action Research (PAR). The model of development of the product used 4D model (Define, Design, Development, and Dissemination) adopted from the model of Thiagarajan et al. (1974). Afterward, users of budgeting were taught so they were proficient at using the product of Internal Cost Standard (SBI). The result of this activity discloses that the SBI book is successful to be produced in the form of a digital known as the SBI e-pocketbook to budgetary users in STAIN Majene. It is a costing unit acting as the guidance of internally budgetary calculation of STAIN Majene and a necessary instrument in making budgetary allocations so that SBI product contributes to budgetary users in STAIN Majene.*

**Keywords:** Budget, Control, Cost, Performance, SBI

**Correspondence author:** Ahmad Abbas, ahmad.abbas@stainmajene.ac.id, Majene, Sulawesi Barat, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN

Pengendalian adalah bagian dari proses manajemen. Terry & Stallard (1980) mengartikan pengendalian sebagai suatu proses penentuan dan pelaksanaan sesuai dengan standar. Standar akan mudah ditentukan jika kontrol pelaksanaan kerja dilakukan. Pengendalian berkedudukan penting dalam manajemen khususnya anggaran sebab tujuan pengendalian adalah untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang

telah ditetapkan terarah sarannya dan sesuai dengan perencanaan (Sukarna, 2011). Beberapa prinsip pengendalian sebagaimana yang disampaikan oleh Davey et al. (1956) adalah prinsip sasaran, efisiensi, tanggung jawab, pengawasan langsung, refleksi perencanaan, penyesuaian dengan organisasi, dan prinsip standar. Pada prinsip efisiensi, pengendalian adalah efisien jika dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan hal-hal lain yang tak terduga. Satu prinsip selanjutnya jika dikaitkan dengan anggaran adalah prinsip refleksi perencanaan di mana pengendalian berfungsi sebagai cerminan yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Sebagai contoh, jika pengendalian dikaitkan dengan pemeriksaan keuangan, kesediaan anggaran belanja perlu diketahui terlebih dahulu. Proses pengendalian dapat dilakukan dengan menentukan standar atau dasar pengendalian, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan memastikan jika terdapat perbedaan, dan memperbaiki penyimpangan yang akan timbul (Sukarna, 2011; Terry & Stallard, 1980)

Pengendalian adalah salah satu pendekatan baru yang membantu manajemen untuk beradaptasi lebih baik dengan keadaan baru, untuk membangun organisasi yang vital dan jelas, yang mampu menghadapi tantangan baru (Bedenik, 2015). Pengendalian yang dilakukan dengan baik mampu memberikan dukungan manajemen proaktif dan netral dalam keputusan dan proses manajemen mereka. Albertini (2019) menyatakan bahwa pengendalian dapat berkontribusi terhadap perkembangan kemampuan lingkungan dengan memusatkan perhatian pada prioritas strategis dan menstimulasi dialog. Tugas pengendalian adalah untuk mendukung manajemen agar mampu keputusan yang rasional (Szóka & Kovács, 2019). Dalam anggaran, pengendalian sangat diperlukan. anggaran pada dasarnya adalah rencana tertulis keuangan yang menguraikan sumber pendapatan dan pembiayaan dalam suatu periode (Bastian, 2019; Biduri, 2018). Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian (Bastian, 2016; Mardiasmo, 2002). Dalam pengendalian anggaran, organisasi perlu membuat standar penyusunan atas pencapaian penerimaan dan pengeluaran yang selanjutnya dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan melakukan komparasi dengan realisasi anggaran yang terlebih dahulu ditetapkan.

Pengukuran kinerja memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan ketentuan jasa pemerintah untuk mencakup pengukuran jasa spesifik (Bastian, 2014). Dalam beberapa organisasi, akuntansi menyediakan pengukuran kinerja, apakah perubahan dalam pendapatan, beban, asset, kewajiban, dan arus kas selama periode yang diharapkan. Dalam pengukuran kinerja, Jones (2014) menguraikan elemen-elemen kinerja yang perlu dipahami.

1. Masukan (*input*). Sumber daya yang digunakan oleh pemerintah diukur dengan biaya dan juga secara non-keuangan, misalnya dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
2. Keluaran (*output*). Jasa yang disediakan diukur dengan pengukuran non-keuangan.
3. Hasil (*outcome*). Jasa yang disediakan, tetapi penggunaannya tidak bisa diukur, pertimbangan kualitatif, walaupun ketika pertimbangan dari hasil secara sistematis mengumpulkan dari penerima jasa, sejenisnya berdasarkan pada *interview* atau kuesioner.

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, sementara keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Sedangkan, hasil berkaitan dengan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Indikator hasil lebih utama dari pada keluaran. Walaupun produk telah dicapai dengan baik, belum tentu secara hasil kegiatan tersebut telah dicapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas pekerjaan yang lebih tinggi di mana menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran, itu memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan bagi masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja sebaiknya berkaitan dengan visi, misi, dan rencana strategis (Bastian, 2014). Anggaran tentunya berorientasi pada pencapaian terhadap kinerja. Dalam beberapa penelitian, penganggaran berbasis kinerja mendorong dampak positif terhadap instansi pemerintah dan tercipta akuntabilitas (Akbar, 2018; Biswan & Grafitanti, 2021; Sofyani, 2018). Indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja adalah komponen-komponen dalam penganggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja menunjukkan penilaian atas kegiatan yang diselenggarakan. Indikator ini terdiri dari kinerja utama dan kinerja kegiatan. Pada standar biaya, estimasi dan acuan biaya hadir dalam membuat dan melaksanakan kegiatan. Standar biaya di Indonesia mengacu pada kementerian keuangan. Standar biaya berperan dalam merencanakan dan menyusun anggaran. Komponen penting lainnya adalah evaluasi kinerja yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan program kerja. Dengan pengendalian, kinerja dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian dan evaluasi perlu didukung oleh kebijakan internal.

Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene adalah lembaga pendidikan yang diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 12 November 2016 dan akan turut berperan aktif dalam pemecahan berbagai permasalahan umat baik nasional maupun lokal. Hal tersebut sejalan dengan misi STAIN Majene yang hendak menghasilkan sarjana yang berkarakter, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman, dan kebudayaan; menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris); menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas; dan kompetitif serta akan mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif dan bermanfaat. Untuk mewujudkan misi tersebut tentu diperlukan tata kelola universitas yang baik yang akan diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Visi SPI di STAIN Majene adalah Bermutu, Profesional, dan Independen, dalam mengawal terciptanya *good and clean governance* untuk mencapai tujuan STAIN Majene yang unggul dan *malaqbiq*. Sementara misi SPI, di antaranya dengan melaksanakan pengawasan dan mengidentifikasi atau menghilangkan risiko keuangan dan non-keuangan untuk mewujudkan tata kelola STAIN Majene yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Fenomena yang terjadi saat ini ialah penyerapan anggaran tahun 2020 di STAIN Majene sangat bagus dengan nilai 99,11, namun belum diimbangi dengan capaian keluarannya yang masih sangat rendah. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh STAIN Majene adalah pembebanan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan, misalnya pembimbing dan penguji di akhir tahun 2021 dilaksanakan oleh dosen STAIN Majene, kelebihan jam mengajar, dan terjadi penyesuaian honorarium kepada dosen honorer. Kejadian ini sangat signifikan diwaspadai dan perlu diatasi sebab jika terjadi penyerapan yang terlalu tinggi di setiap belanja, maka keadaan ini memicu

ketidakseimbangan *output*. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, STAIN Majene perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pemerintah Indonesia, 2003), sistem penganggaran seutuhnya difungsikan dalam tiga pilar, yaitu penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan tidak kalah pentingnya adalah penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran. Dalam suatu anggaran, pernyataan terkait dengan estimasi kinerja yang akan dicapai selama suatu periode perlu diuraikan (Mardiasmo, 2005). Halim & Kusufi (2014) menyatakan bahwa anggaran merupakan dokumen estimasi kinerja mengenai penerimaan dan belanja yang disajikan dalam ukuran moneter yang menyertakan data masa lalu sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja dapat dilihat melalui keterkaitan pengalokasian anggaran dengan rencana kerja yang nantinya memiliki target pencapaian dalam prioritas. Hal ini merupakan tanggung jawab beberapa Kementerian/Lembaga. Sasaran penganggaran berbasis kinerja adalah capaian target kinerja dengan memanfaatkan sarana anggaran. Pertimbangan target kinerja demi terciptanya efektivitas pelaksanaan kegiatan adalah fungsi dari pilar penganggaran berbasis kinerja.

Hansen et al. (2010) menyatakan bahwa penganggaran dilakukan dalam manajemen biaya yang menggunakan standar biaya yang mengakibatkan terciptanya perencanaan dan pengendalian dari suatu kinerja. Standar biaya sebagai alat pengendalian biaya (Blocher et al., 2019). Penganggaran berbasis kinerja mengaitkan pendanaan dan capaian keluaran yang membutuhkan metode pembiayaan yang berfokus pada penguatan biaya keluaran. Dengan demikian, diperlukan standar biaya sebagai salah satu alat pengendalian anggaran berbasis kinerja.

Selama ini, standar biaya mengacu pada payung hukumnya sesuai peraturan dari Menteri Keuangan yang sifatnya generalistik. Padahal setiap satuan kerja memiliki porsi anggaran sesuai dengan kapasitasnya sebagai sebuah institusi sehingga standar biaya yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) perlu diturunkan lagi menjadi standar biaya internal STAIN Majene sehingga pedoman Standar Biaya Internal (SBI) menjadi solusi dalam isu masalah saya di satuan kerja. Bertambahnya pelaksanaan program kegiatan di STAIN Majene mendorong pelaksanaan pengabdian ini dilakukan untuk mengoptimalkan sistem pengendalian anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan produk berupa buku panduan standar biaya internal yang selanjutnya diproduksi secara digital sebagai alat pengendalian anggaran berbasis kinerja.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini didesain menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*. Peneliti turut langsung terlibat dalam penyusunan produk Standar Biaya Internal (SBI) e-pocketbook. Dalam menyusun produk tersebut, model pengembangan produk dilakukan melalui proses *Research and Development (R&D)* yang bertujuan untuk menghasilkan produk (Borg & Gall, 1983). Tahapan dilakukannya R&D sesuai kebutuhan. Pada dasarnya, Borg & Gali (1983) menentukan sepuluh tahapan dalam melaksanakan R&D, yaitu, pengumpulan kajian terkait topik yang dipilih dan menganalisis kebutuhan, merencanakan produk, mengembangkan produk, menguji produk, melakukan revisi dari produk yang diuji, menguji kembali produk, selanjutnya

melakukan diseminasi dan evaluasi dan menggunakan produk secara massal. Gustiani (2019) mengungkapkan bahwa beberapa peneliti sebelumnya berusaha menyederhanakan jumlah tahapan pelaksanaan R&D yang disesuaikan dengan model pengembangan produk.

Gambar 1 menunjukkan model pengembangan produk yang digunakan. Model pengembangan produk tersebut menggunakan model 4D (*Define, Design, Development, and Disemination*). Sebagaimana implementasi dari Thiagarajan et al. (1974) yang kemudian diadopsi oleh ilmuwan selanjutnya (Rizki & Linuhung, 2016), kegiatan ini memulai model R&D dari menganalisis, merancang, mengembangkan, dan melakukan diseminasi produk buku saku SBI.



Gambar 1. Model Pengembangan Produk 4D

Tujuan menggunakan model R&D adalah untuk menghasilkan produk atau jasa yang efektif dan dirasakan bermanfaat bagi pengguna. Oleh karena itu, pengembangan SBI e-pocketbook dimulai dari analisis data dengan mengumpulkan informasi dan melakukan kajian terkait SBI. Dalam tahapan analisis, estimasi biaya diperlukan. Tahapan 2 adalah rancangan biaya standar biaya internal. Tahapan 3 dan 4 adalah pengembangan buku secara fisik dan secara digital serta diseminasi produk yang selanjutnya dilakukan implementasi produk di STAIN Majene.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data dalam R&D dilakukan secara kualitatif. Kothari (2004) menyiratkan bahwa analisis data bertujuan untuk mengetahui pola hubungan yang terdapat pada data yang dikumpulkan. Data kemudian diorganisir, dipilah menjadi satuan yang mampu dikelola, membuat sintesis hingga mengetahui pola dan membuat keputusan (Johnson & Christensen, 2017; Moleong, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PP No. 90 Tahun 2010 menguraikan mekanisme penyusunan RKA-KL yang dapat dibuat dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja

(Pemerintah Indonesia, 2010). Pendekatan ini memperhatikan efisiensi pada pencapaian keluaran dan hasil yang diharapkan. Salah satu instrumen yang digunakan penganggaran berbasis kinerja adalah standar biaya. Dengan standar biaya, dipastikannya alokasi anggaran bisa menghasilkan keluar yang terukur dan terjaminnya kualitas.

Pada tahapan 1, pengembangan SBI *e-pocketbook* diawali dengan mengumpulkan informasi terkait biaya-biaya internal di STAIN Majene. Tahapan ini perlu informasi keuangan dari pihak keuangan. Tahapan 2 dan 3 yaitu rancangan dan pengembangan produk. Pada tahapan rancangan, estimasi biaya dan penetapan standar biaya dilakukan dengan mengacu pada standar biaya masukan Kementerian Keuangan Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan ini, biaya diestimasi dengan mempertimbangkan juga harga pasar terutama pada estimasi biaya bahan habis pakai. Pada tahapan ini pula, biaya internal sangat mengacu pada SBM Tahun Anggaran 2022.

Penggolongan biaya-biaya yang terkandung dalam standar biaya internal adalah sebagai berikut:

1. Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Panitia, dan Praktisi
2. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
3. Honorarium pada Tim Kegiatan/ Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website
4. Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor
5. Biaya, Transportasi, Penginapan, dan Tiket Pesawat
6. Biaya Bahan Habis Pakai (Konsumsi, ATK, dan Lain-lain)

Pada rancangan produk SBI, materi perpajakan dan bea materi disajikan pula secara praktis. Di samping itu, produk ini juga dilengkapi dengan penjelasan dokumen pelaporan kegiatan dari bukti penugasan dan kinerja, misalnya Surat Keputusan (SK), Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya, dokumentasi kegiatan, serta SPTJM sehingga buku saku digital SBI bisa menjadi pedoman sepenuhnya dalam melakukan membuat rencana anggaran biaya pada kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan sivitas akademik STAIN Majene



Gambar 2. Buku SBI STAIN Majene

Selama proses tahapan pengembangan produk, dibuatlah format buku sebagaimana hasil halaman sampul dan belakang ditunjukkan pada Gambar 2. Produk tersebut berjudul Buku Panduan Standar Biaya Internal.



Gambar 3. SBI berbasis Digital

Setelah itu, SBI yang sudah dibuat berupa buku didesain secara digital yang selanjutnya disebut SBI *e-Pocketbook*. Aplikasi yang digunakan dalam mendesain buku SBI menjadi buku saku digital menggunakan I-Spring Suite.

Setelah produk SBI dibuat, tahapan pengembangan yang keempat adalah diseminasi produk yang telah dibuat. Diseminasi produk dilakukan kepada pimpinan dan pengguna anggaran setiap unit STAIN Majene. Tahapan diseminasi dibuat dengan tujuan agar produk ini bisa tergambar oleh para pimpinan terlebih dahulu hingga nantinya akan didistribusikan kepada pengguna anggaran lainnya.



Gambar 4. Diseminasi Produk



Hasil diseminasi produk disosialisasikan kepada seluruh akademisi di STAIN Majene mendapat respon positif dan biaya-biaya standar internal dapat ditetapkan dan digunakan. Standar biaya internal adalah satuan biaya yang menjadi acuan perhitungan anggaran internal STAIN Majene. Produk SBI adalah instrumen penting dalam penyusunan alokasi anggaran. SBI STAIN Majene mencakup harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun komponen masukan kegiatan.

Produk SBI *e-pocketbook* ini menjadi alat bagi pelaksana anggaran dalam menyusun dokumen rencana kerja di STAIN Majene. Produk ini mampu mengalokasikan dengan baik belanja-belanja yang terkait dengan Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Honorarium Tim Kegiatan/Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website. Biaya, Transportasi, Penginapan, dan Tiket Pesawat dan Biaya Bahan Habis Pakai (Konsumsi, ATK, dan Lain-lain). Terlebih lagi, pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang setiap tahun direalisasikan anggarannya untuk para dosen. Produk SBI yang dibuat ini tentu mengarahkan mereka untuk menyusun rencana anggaran biaya yang akurat dan sistematis sehingga pelaksanaannya tepat guna sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu, produk buku saku digital SBI ini dapat berfungsi sebagai alat pengendalian berbasis kinerja. Hal ini dapat bertindak sebagai alat untuk menghindari pengeluaran yang dianggap lebih besar secara internal, atau pun terlalu rendah serta terciptanya efisiensi anggaran.

## SIMPULAN

Produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah e-SBI yang dapat digunakan secara praktis di *smartphone*. Empat tahapan yang dilakukan dalam menghasilkan produk SBI tersebut yaitu dengan menganalisis, merancang, mengembangkan, dan melakukan diseminasi produk SBI. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian ini berhasil menyediakan produk berupa SBI berbasis aplikasi *smartphone* yang sangat berimplikasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian anggaran berbasis kinerja di STAIN Majene.

Produk ini pada dasarnya menjelaskan tentang Proses penyusunan SBI STAIN Majene Tahun Anggaran 2022 mulai dilakukan sejak terbitnya Surat Keputusan Ketua STAIN Majene No. 119 Tahun 2021 tentang SBI STAIN Majene Tahun Anggaran 2022. Dalam posisinya, buku saku digital SBI ini berfungsi menjadi acuan standar biaya pertama dan utama dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan/anggaran STAIN Majene. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi, melainkan agar *stakeholders* di STAIN Majene bisa lebih mudah memahami tarif biaya dan menyusun harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran STAIN Majene tahun anggaran 2022 sebab produk SBI ini mendorong mereka untuk dipandu lebih informatif dalam menyusun rencana dan pelaporan realisasi kegiatan.

Kegiatan ini merekomendasikan secara praktis bagi perguruan tinggi khususnya level sekolah tinggi yang perlu menyusun SBI digital sebagai sarana untuk mempermudah penggunaan SBI. Rekomendasi secara khusus STAIN Majene, pembuatan produk SBI sangat penting dilakukan setiap tahun anggaran yang mengikuti perkembangan PMK terkait SBM. Yang perlu diingat adalah bahwa jika produk ini belum menjangkau semua aspek, itu karena sifatnya tidak berdiri sendiri dan tetap merupakan turunan dari Standar Biaya Masukan (SBM), maka ketentuan yang belum



diatur dalam SBI ini akan kembali mengacu pada SBM dan standar biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Walaupun ada perbedaan, mungkin yang paling menonjol adalah pada SBI ini dilengkapi dengan kolom keterangan/dasar penetapan tarif yang berfungsi seperti aturan main penggunaan tarif. Setelah melihat tarif bisa langsung membaca penjelasannya. Selain itu, produk SBI ini juga dilengkapi dasar ketentuan perpajakan serta kelengkapan dokumen dan format pelaporan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhii, K., Hakim, A., & Makmur, M. (2019). Proses Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. *Jurnal Profit*, 13(1), 47–62.
- Akbar, D. S. (2018). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(1).
- Albertini, E. (2019). The Contribution of Management Control Systems to Environmental Capabilities. *Journal of Business Ethics*, 159(4). <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3810-9>
- Bastian, I. (2014). Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan. In *Salemba Empat*.
- Bastian, I. (2016). Sistem Akuntansi Sektor Publik. In *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Bedenik, N. O. (2015). The challenge of controlling. *International Journal of Industrial Engineering and Management*, 6(4).
- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik*. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1). <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368>
- Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E., & Smith, S. (2019). Cost Management: A Strategic Emphasis. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Issue 9).
- Borg, W. ., & Gall, M. . (1983). Educational Research an Introduction fourth edition. *Longman Inc*, 1(1).
- Davey, H. W., Koontz, H., & O'Donnell, C. (1956). Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. *Industrial and Labor Relations Review*, 9(2). <https://doi.org/10.2307/2519447>
- Gustiani, S. (2019). Research and Development ( R & D ) Method as a Model Design in Educational Research and Its Alternatives. *Holistics Journal*, 11(2).
- Halim, A., & Kusufi, S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Hansen, D. R., Mowen, M. M., & Madison, T. (2010). Cornerstones of Cost Accounting. *Issues in Accounting Education*, 25(4). <https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.4.790>
- Hermanto, C. B. (2019). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survey di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana. *ISSN 2502-3632*

- (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9).
- Johnson, B., & Christensen, L. (2017). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches — sixth edition. In *SAGE Publications, Inc.*
- Jones, R. (2014). Public Sector Accounting. In *Public Sector Accounting*. <https://doi.org/10.4135/9781446263105>
- Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques - C. R. Kothari - Google Books. In *New age international*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2005). *Reformasi Keuangan negara: Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban*. Magister Ekonomi Pembangunan UGM.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022*.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga*.
- Pratama, N. D., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1). <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.23>
- Rizki, S., & Linuhung, N. (2016). Design Research and Development 4D Model for Developing Mathematics Teaching Materials. In *The First International Conference on Law, Economics and Education Muhammadiyah University of Metro, Indonesia*.
- Sofyani, H. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja “ A ” In Regional Government With “ A ” Performance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1).
- Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung. *CV Mandar Maju*.
- Szóka, K., & Kovács, B. (2019). *Controlling as Driving Force at Today's Dynamic Changing Companies*. <https://doi.org/10.20472/iac.2019.047.025>
- Terry, G. R., & Stallard, J. J. (1980). *Office Management and Control: The Administrative Managing of Information* (7th ed.). Homewood, Illinois.
- Thiagarajan, S., Semmel, D. S & Semmel, M.I. (1974). Instructional pengembanganment for training teachers of exceptional children. In *A sourcebook*. Minnesota: University of Minnesota
- Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15433>
- Saddhono, K., Hasanudin, C., Fitriainingsih, A. (2019). The ability to think creatively on SSCS using schoology Apps, how is the student's language metacognitive

awareness?. *Ingénierie des Systèmes d'Information*, 24(4), 367-375.  
<https://doi.org/10.18280/isi.240402>.

Sicat, A. S. (2015). Enhancing college student's proficiency in business writing via schoology. *International Journal of Education and Research*, 3(1), 159-178.